

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Gellner, Ernest. 1994. *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan* Bandung: Mizan.

Hikam, Muhammad. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.

Soekanto, Soerjono, 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung

Adi, S. (2002). *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat, Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Agus, D. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* Yogyakarta: University Press.

Billah, M. (1990). *Peran Ornop Dalam Proses Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat* . Jakarta: PT Bumi Aksara.

Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka .

Clark, j. (1995). *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

Faturohman, D., & Sobari, W. (2002). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UMM Press.

Gaffar, M. D. (1984). Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan. Bina Aksara.

Gaffar, A. (2000). Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gellner, E. (1994). Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan . Bandung: Mizan.

Haricahyono, S. G. (1991). Ilmu Politik dan Perspektifnya. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mansour, F. (1996). Masyarakat sipil untuk transformasi sosial pergolakan ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Meleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Rosda Karya.

Mubyarto, d. (1994). Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal. Yogyakarta: Aditya Media-P3PK UGM.

Ndraha, T. (1990). Pembangunan Masyarakat Menyiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rieneka Cipta.

Novri, S. (2014). Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: PT Pajar Interpretama Offset.

Saidi, Z. (1995). Secangkir Kopi Max Havelaar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, & Soerjono. (2010). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Soetrisno, L. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat, G. (1997). Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Syamsir, T. (2014). Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.

Korten, D. (2001). Menuju Abad ke-21. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Asrinaldi, "Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia", Tiara Wacana, Yogyakarta, 2014.

Enrique Larana, Hank Johnston, and Joseph R. Gustfild, *New Social Movements: From Ideology to Identity* (Philadelphia: Temple University Press, 1994), hlm. 6-9. Dalam buku Prof. Miriam Budiarjo, hlm. 386



Internet :

<https://www.kompasiana.com/nurmayanda25259/5fcf86688ede4817140de0e2/kelompok-kepentingan-dan-kelompok-penekan-apa-yang-membedakan>

<https://kumparan.com/berita-update/pengertian-kelompok-penekan-beserta-peranannya-di-dunia-1wnVbmKpeIv/full>

<https://kodamjaya.tniad.mil.id/dukung-kepwalkot-bekasi-personel-koramil-01-kranji-dampingi-dan-kawal-penertiban-lapak-pkl-di-bekasi-selatan/>

<https://jdih.bekasikota.go.id/jdih/web/uploads/LD%20Perda%20Nomor%2011%20Tahun%202015.pdf>

<https://www.liputan6.com/news/read/172992/ratusan-pkl-di-stasiun-bekasi-diusir>

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/152750/massa-gmbi-tolak-pelarangan-pkl-di-stasiun-bekasi>

<https://amp.kompas.com/regional/read/2009/02/16/1424367/index.html>

<https://www.berdikarionline.com/pt-kai-dan-pengurusan-pkl/>



Jurnal :

Hikam, M. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.

Ibrahim, R. (1997). *Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000*. Jakarta: LP3ES.

Tim ICCE, 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*.

Jakarta: Kencana Prenada.

Morris, S. (2000). *Defining Non-profit Sector, Some Lesson From History, Voluntas. International . Journal of Voluntary and Non-Profit Organization*.

Prijono, O., & Pranarka, A. (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.

Ralston, L., Anderson, J., & Colson, E. (1983). *Voluntery Effort in Decentralized Management*. California: University of California Press.

Stake, R. (2010). *Qualitative Research: Studying How Things Work*. The Guilford Press.

Tricanto, e. a. (2000). *Intervensi LSM dan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.

Lawang, R. (2001). *Kapital Sosial*. Jakarta: UI Press.

Peter Willet, *Pressure Group in the global system*, New york, St. martin Press.

Abas, Isman. *Civil Society Organizations (CSO) di aras lokal:: Studi tentang partisipasi konsorsium Makuwaje dalam perumusan kebijakan publik di Provinsi Maluku Utara*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2006.

BIODATA PENULIS

Skripsi ini ditulis oleh Farizha Alvianda Putra. Lahir pada tanggal 09 Juli Tahun 1998 di RSIA Santo Yusuf Jakarta Utara. Anak kedua dari pasangan suami istri (Alm) Bapak Fauzi dan Ibu Susi Yuniati dari tiga bersaudara. Tempat tinggal saat ini Jl. Piano 12 Tarumajaya. Villa mutiara gading blok f3 no 16 Rt 03 Rw 018 Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi Kabupaten, kode pos 17215. Latar belakang pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri SDN Setia Asih 03 tahun 2004 sampai tahun 2010, dilanjutkan dengan Sekolah menengah pertama Swasta Daar El-Salam Bojong kulur tahun 2010 sampai tahun 2013 dan Sekolah menengah atas Swasta Taman Harapan 1 Bekasi tahun 2013 sampai tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Universitas Nasional Jakarta Selatan dengan mengambil Program Sarjana, terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik.



**PANDUAN WAWANCARA KETUA DAN SEKRETARIS JENDERAL
LSM GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA DISTRIK KOTA**

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarakatuh. Selamat pagi/siang/sore. Saya Farizha Alvianda Putra, Mahasiswa Universitas Nasional Jurusan Ilmu Politik. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai “Peran LSM sebagai kelompok penekan terhadap pengusuran pedagang kaki lima di Stasiun Kota Bekasi Tahun 2013 studi kasus LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Distrik Kota Bekasi” untuk keperluan tugas akhir sebagai mahasiswa S1 di Universitas Nasional. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu guna menjawab beberapa pertanyaan saya.

Perkenalan :

1. Menanyakan nama, usia, kegiatan sehari-sehari apa yang dilakukan.
2. Sejak kapan masuk kedalam LSM GMBI distrik kota Bekasi.
3. Motivasi awal dan faktor yang mendorong bergabung kedalam LSM.
4. Pengalaman positif dan negatif selama bergabung dalam LSM GMBI.
5. Penilaian atau pendapat mengenai LSM GMBI setelah bergabung.
6. Harapan terhadap LSM GMBI kedepannya.

Spesifik mengenai kasus pengusuran yang dilakukan PT. KAI (Persero) terhadap pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi tahun 2013 :

1. Alasan LSM GMBI menolak kasus penggusuran yang dilakukan PT.KAI (Persero) terhadap pedagang kaki lima.
2. Dasar hukum yang digunakan PT.KAI dalam melakukan penggusuran terhadap pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi.
3. Hasil akhir dari proses penggusuran yang dilakukan oleh PT.KAI (Persero).

Spesifik mengenai peran LSM GMBI sebagai kelompok penekan dalam kasus penggusuran pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi tahun 2013:

1. Kontribusi LSM GMBI dalam menolak kasus penggusuran yang dilakukan PT. KAI (Persero) terhadap pedagang kaki lima.
2. Harapan LSM GMBI terhadap pedagang kaki lima.
3. Bagaimana strategi LSM GMBI dalam proses penolakan kasus penggusuran pedagang kaki lima.



Hasil Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Transkrip Bapak Asep Sukarya Sekertaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi

M : Selamat sore Pak saya Farizha Alvianda Putra, biasa dipanggil Alvin pak. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional, jurusan Ilmu Politik tahun 2016. Mohon izin untuk mengajukan pertanyaan untuk menyusun skripsi tentang Peran LSM Sebagai Kelompok Penekan Terhadap Penggusuran Pedagang Kaki Lima Di Stasiun Kota Bekasi Tahun 2013 (Studi Kasus LSM GMBI Distrik Kota Bekasi).

N : Selamat sore juga Alvin, baik silahkan apa yang ingin kamu tanyakan?

M : Baik pak yang ingin saya tanyakan, apa bapak mengetahui sejarah atau asal-usul LSM GMBI?

N : Jadi sejarah dan asal-usul LSM GMBI terbentuk itu sekitar dari tahun 2006 atau 2007 awalnya bernama GMBI Bekasi raya, permasalahan dimulai pada saat pedagang kaki lima yang dahulu berdagang di dalam peron stasiun kota Bekasi meminta bantuan dan pendampingan kepada LSM GMBI Bekasi raya agar tetap bisa berdagang di dalam stasiun kereta api kota Bekasi, setelah itu pada sekitar tahun 2007 atau 2008 LSM GMBI Bekasi raya merubah nama menjadi LSM GMBI distrik kota Bekasi, dan yang menjadi ketua LSM GMBI distrik kota Bekasi pertama adalah Abah Zakaria sampai saat ini. Jadi latar belakang Abah Zakaria adalah ketua pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi yang memberikan ultimatum

kepada LSM GMBI pada saat itu, bahwa apakah LSM GMBI 'sakti'. Dalam artian apakah LSM GMBI yang baru aktif di tahun 2008 bisa membuktikan bahwa, LSM GMBI distrik kota Bekasi dapat membantu para pedagang kaki lima agar tetap berdagang dan tidak digusur oleh pihak PT. KAI. Maka Abah Zakaria mau menjadi ketua LSM GMBI distrik kota Bekasi. Setelah LSM GMBI distrik kota Bekasi berhasil dalam melakukan upaya agar para pedagang kaki lima tidak digusur, Abah Zakaria yang sebelumnya menjadi ketua pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi, akhirnya diangkat menjadi ketua LSM GMBI distrik kota Bekasi. Artinya LSM GMBI distrik kota Bekasi berdiri karena adanya permintaan bantuan pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi kepada LSM GMBI Bekasi raya.

M : Lalu pak, apa tujuan LSM GMBI dibentuk?

N : Jadi LSM GMBI distrik kota Bekasi dibentuk sesuai dengan visi dan misinya. Visi dari LSM GMBI adalah terwujudnya gerakan masyarakat bawah dan gerakan intelektual yang berjuang untuk mengangkat harkat martabat kaum lemah dan termarginalkan dengan dijiwai semangat negara dan bela rakyat guna tercapainya masyarakat Indonesia yang berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan sosial, artinya didalam visi dan misi LSM GMBI tersebut bahwa terwujudnya sebagai gerakan masyarakat bawah dan gerakan intelektual, jadi seorang masyarakat bawah bukannya dianggap masyarakat yang terbawah tapi harus menjadi gerakan intelektual, jadi pada prinsipnya aktifitas LSM GMBI ruhnya adalah sebagai

pemimpin karena jika kita sebagai pemimpin maka kita bisa memimpin masyarakat yang tertindas. Lalu bagaimana kami mewujudkan daripada visi tersebut dan kami juga memiliki misi yaitu memberikan kontribusi pemikiran dan melaksanakan gerakan pembelaan terhadap kaum lemah yang berbasis kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat. Dan bicara tentang pedagang kaki lima mereka termasuk masyarakat yang tertindas, artinya kami harus memberikan kontribusi pemikiran lalu memberdayakan agar para pedagang kaki lima tetap bisa berdagang di stasiun kota Bekasi.

M : Apa alasan yang membuat LSM GMBI menolak kasus penggusuran yang dilakukan PT. KAI terhadap pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi pada tahun 2013?

N : Dasar pemikiran kita pada saat itu sangat sederhana, pedagang kaki lima atau pelaku ekonomi mikro adalah basis kekuatan ekonomi kerakyatan, kenapa saya bilang basis ekonomi kerakyatan karena pedagang kaki lima itu ketika mereka berdagang hanya untuk mencari kehidupan yang layak bukan untuk mencari kekayaan yang lebih, artinya bagaimana mereka bisa mengisi perut mereka, menyekolahkan anak-anaknya, menghidupi keluarganya, itulah yang menjadi dasar ketika LSM GMBI mendampingi pedagang kaki lima, karena ketika persoalan pedagang kaki lima itu digusur pemerintah tidak memberikan solusi, makanya kita pertahankan yaitu harus tetap ada solusi. Ketika pedagang kaki lima akan digusur kita harus tetap mempertahankan, yang akhirnya LSM GMBI melakukan negosiasi kepada pemerintah, PT. KAI dan bantuan dari DPRD, kita

lakukan komunikasi secara intensif kepada PT. KAI. Pada waktu itu pedagang kaki lima tidak diperbolehkan berdagang diatas peron karena sedang dalam tahap pembangunan proyek *double track*, akhirnya pedagang kaki lima bergeser dan berdagang di bawah ditempat parkir pada saat itu, setelah itu pun pedagang kaki lima tetap dalam pengawasan dan dikasih waktu agar setiap pedagang kaki lima, ketika PT. KAI ingin melakukan perluasan dan pembangunan pedagang kaki lima harus bergeser dan kita mengikuti peraturan tersebut sampai akhirnya kita diberikan tempat oleh pemerintah kota Bekasi dan PT. KAI boleh berdagang diluar area stasiun kota Bekasi, artinya apa jika kalau pada saat itu LSM GMBI dan pedagang kaki lima tidak melakukan gerakan massa aksi, secara otomatis pedagang kaki lima tidak bisa berdagang. Berkat negosiasi kita yang dibantu dengan pemerintah kota Bekasi dan DPRD dan kita juga komunikasikan kepada PT. KAI. Kita boleh berdagang jika proyek berlanjut pedagang kaki lima harus bergeser, pada saat itu pedagang kaki lima akan diusir dan tidak diberikan tempat. Kita tetap berusaha bernegosiasi dari pedagang yang tadinya 100 orang dan hanya diberikan tempat untuk 40-50 orang dan pedagang juga ada yang terkena seleksi alam, yang kuat tetap berdagang jika tidak kuat akan bergeser dengan sendirinya karena kadang-kadang berdagang sering diusir. Pada saat itu yang masih tetap berdagang sekitar 40-50 pedagang.

M : Bagaimana cara LSM GMBI menolak kasus penggusuran yang dilakukan PT.KAI?

N : Penolakan kita pada waktu itu adalah, bahwa ketika bicara tentang pedagang kaki lima itu bicara tentang perut dan bicara tentang kehidupan itulah yang membuat LSM GMBI distrik kota Bekasi menolak. Kenapa kita tolak? Karena pada saat pedagang kaki lima diusir, PT. KAI tidak memberikan tempat dan pedagang kaki lima akan diusir begitu saja. Itulah dasar penolakan kita, memang benar PT. KAI memiliki otonomi tersendiri atas wilayahnya baik di sisi selatan maupun timur, dasarnya adalah akan melakukan pembangunan proyek *double track* dan perluasan stasiun. Akhirnya tetap kita tolak habis-habisan karena mereka tidak dapat memberikan solusi ketika kita bicara tentang satu pedagang itu bukannya menghidupi satu orang saja, mereka mempunyai keluarga. Kita tidak menginginkan ketika mereka tidak berdagang anak mereka bisa terlantar lalu menjadi kriminal. Ketika GMBI akan mendampingi masyarakat, kita tidak sembarangan membantu. Prosedur awal warga harus membuat surat permohonan pendampingan kepada GMBI lalu buat kronologis sebagai pedagang kaki lima yang tergusur dan kami hanya mengarahkan mereka untuk menulis surat tersebut dengan tulisan tangan terkait keluhan yang ingin dibantu, setelah sudah diurus data-data pengaduan tersebut lalu GMBI membentuk tim dan ditunjuklah anggota dari salah satu pedagang kaki lima tersebut siapa yang akan menjadi kordinator misalkan siapa yang di tuakan. Setelah itu kami terus

berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan kordinator tersebut, ketika surat permohonan telah selesai dibuat kami akan menjawab bahwa kami siap mendampingi dengan persyaratan fotocopy kartu tanda pengenal atau foto tempat dagangannya. Setelah itu kami buat surat kuasa pendampingan, lewat surat kuasa pendampingan itulah kami siap untuk membantu, lalu kami melakukan analisa terlebih dahulu dengan mengirim surat laporan ke semua instansi seperti kepolisian, pemerintah kota, pemerintah daerah, camat dan lainnya terkait masalah yang dilaporkan oleh pelapor. Agar instansi tersebut mengetahui bahwa pedagang kaki lima di Stasiun Kota Bekasi adalah binaan LSM GMBI dan agar kami tidak dianggap pungli, maka dibuatlah kesepakatan bentuknya adalah fakta integritas yaitu kesetiaan pedagang kaki lima terhadap GMBI. Pedagang kaki lima membuat fakta integritas agar GMBI mengetahui bahwa pedagang kaki lima adalah anggota binaan dari LSM GMBI, dengan membuat surat yang contoh isinya adalah “sebagai anggota binaan maka kami siap berkontribusi mendonasikan dana sesuai kesepakatan pedagang kaki lima dengan LSM GMBI sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada GMBI”. Dan di tandatangi oleh kordinator jika sudah sepakat, agar LSM GMBI tidak terjebak dan dianggap sebagai pungli. Jika tujuannya adalah PT. Kereta Api Indonesia maka kami meminta informasi, klarifikasi sekaligus audiensi. Kalau tidak ada surat kuasa pendampingan kami tidak akan bergerak, karena nanti kami akan dianggap sebagai provokator. Surat permohonan tersebut berlaku untuk siapapun bukan

hanya untuk pedagang kaki lima saja, baik itu buruh, supir, dan masyarakat lainnya yang merasa terdzolimi dan tidak memiliki bantuan relasi. Dari situlah kami bisa bernegosiasi untuk membantu pihak yang merasa dirugikan.

M : Apakah LSM GMBI membawa kasus pengusuran pedagang kaki lima stasiun kota Bekasi ke jalur hukum?

N : Kami tidak membawa permasalahan ini ke jalur hukum, karena ketika PT. Kereta Api Indonesia melakukan pengusuran tidak dengan kekerasanyang dilakukan oleh aparat PT. KAI atau Kepolisian, LSM GMBI melakukan upaya dengan gerakan massa aksi yang humanis. Agar bisa bermusyawarah dan negosiasi dengan bijak.

M : Lalu pak, bagaimana sikap PT. KAI terhadap pembelaan yang dilakukan oleh LSM GMBI distrik kota Bekasi?

N : Jadi begini, PT. KAI tetap bersikeras pedagang kaki lima tidak boleh berdagang maka dari itu kita upayakan proses bertahap, karena pada saat itu kepala stasiun kota Bekasi tidak bisa memberikan keputusan maka LSM GMBI melakukan diskusi ke PT. KAI DAOP 1 Jakarta, melakukan upaya dengan memberikan surat, jika dengan surat tidak mempan maka kita melakukan audiensi, jika dengan audiensi tidak mempan, maka kita akan melakukan gerakan massa aksi. Pada saat itu kita menggerakkan aksi massa ke kantor pusat PT. KAI di Bandung, lalu hasil dari musyawarah dengan PT. KAI pusat adalah pedagang kaki lima diberikan kesempatan

dengan syarat jangka waktu, ketika PT. KAI melakukan perluasan maka kita akan menyingkir dan kita mengikuti aturan tersebut, itulah hasil terbaik yang diperoleh setelah kita bernegosiasi di kantor pusat PT. KAI Bandung.

M : Bagaimana harapan LSM GMBI kedepannya terhadap kasus penggusuran pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi?

N : Harapan kita yang jelas, pertama walaupun modernisasi pembangunan stasiun kota Bekasi terus berlangsung, keadaan pedagang kaki lima harus tetap bisa berdagang di seputaran stasiun kota Bekasi. Itu harapannya, jadi tidak ada kata steril di lingkungan atau di seputaran stasiun kota Bekasi. Saat ini kita memang tidak boleh berdagang di dalam stasiun kota Bekasi, tetapi kita hari ini masih diperbolehkan oleh pemerintah kota Bekasi dan PT. KAI berdagang di area jalan balai teknik kereta api stasiun kota Bekasi. Itulah harapan kita walaupun nantinya perubahan stasiun kota Bekasi tetap terus dilakukan, keberadaan pedagang kaki lima harus tetap ada karena bagaimanapun pedagang kaki lima adalah kekuatan ekonomi rakyat Indonesia.

M : Kontribusi apa saja yang sudah diberikan LSM GMBI kepada pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi?

N : Kontribusi yang kita lakukan jelas, yang utama adalah mengadvokasi, mendampingi, melindungi dan mengamankan dari oknum-oknum tertentu yang ingin melakukan upaya penertiban, baik itu dari kecamatan,

kelurahan, dan masyarakat sekitar yang merasa resah dengan para pedagang kaki lima. Ketika pedagang kaki lima tidak didampingi oleh LSM GMBI maka, kalau menurut kami mereka tidak akan bisa berdagang di stasiun kota Bekasi. Itulah kontribusi terbaik yang bisa kita lakukan kepada pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima harus terus bisa berjualan sampai anak cucunya, selama pedagang tetap mematuhi peraturan yang telah disepakati, contohnya jika ada pejabat yang akan melakukan peninjauan datang ke stasiun kota Bekasi maka harus di sterilkan dan tutup selama satu jam atau dua jam. Dan juga harus menjaga K3 (keamanan, kebersihan dan kenyamanan) Jika para pedagang kaki lima bandel dan tetap berjualan berarti mereka tidak mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama dengan LSM GMBI.

M : Berapa banyak pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi sebelum terjadinya penggusuran?

N : Sebelum terjadinya penggusuran yang kita tahu pedagang kaki lima ada hampir 100 orang yang berdagang di peron, dan saat ini bahwa yang bertahan sekitar 18-20 pedagang. Yang lainnya bergeser karena memang tempatnya tidak memadai, lalu efek pandemi covid-19, dan mencari penghidupan yang lain di tempat berbeda.

M : Seperti apa kondisi pedagang kaki lima saat ini?

N : Alhamdulillah, walaupun kadangkala mereka tidak bisa berjualan 24 jam karena aturan yang berlaku bahwa berdagang di trotoar jelas itu salah.

Efeknya ada pembatasan waktu berdagang bagi para pedagang kaki lima yang ada di sebelah selatan, contohnya ketika pagi hari di jam 6 sampai jam 9 yang seharusnya mereka sudah mulai bisa berdagang karena arus penumpang yang cukup ramai justru dibatasi waktu mulai berdagangnya karena memang adanya laporan dari masyarakat yang katanya para pedagang kaki lima membuat kemacetan, padahal yang membuat kemacetan belum tentu dari pedagang kaki lima, yang namanya di stasiun itu macet kredit bisa saja dari angkutan umum, ojek, pengendara umum dan lainnya. Karena ada pengaduan masyarakat kepada pemerintah kota Bekasi, akhirnya pedagang kaki lima di sebelah selatan mentaati peraturan tersebut mereka tidak diperbolehkan berdagang mulai dari jam 6 sampai jam 9 pagi, diperbolehkan jam 9 pagi baru buka lalu jam 6 sore tutup kembali. Kalau pedagang yang di sebelah utara mereka bisa berdagang menyesuaikan dengan waktu, artinya adalah karena besarnya arus penumpang kadangkalahanya sampai jam 11 atau jam 12 malam. Biasanya mereka tutup jam 12 malam. Sampai saat ini yang terpenting bagi saya mereka tetap bisa berdagang walaupun kucing-kucingan dan menyesuaikan dengan kondisi waktu dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagi pemerintah itu adalah jalan umum terutama di jalan Juanda, biasanya kalau jam 6 dan jam 9 pagi para pedagang kaki lima dijaga oleh satpol pp, bagi kita tidak masalah asalkan jangan sampai para pedagang kaki lima tidak diperbolehkan berdagang sama sekali.

M : Apa saja kegiatan LSM GMBI distrik kota Bekasi?

N : Sesuai dengan visi dan misi kami, visi mengangkat harkat martabat masyarakat bawah, misinya melakukan komunikasi secara internal atau secara eksternal kepada beberapa organisasi kemasyarakatan dan juga sebagai lembaga sosial kontrol kami tetap eksis didalam pergerakan kita melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah atau swasta, misalkan ketika hari ini kita melihat peran pemerintah didalam pemberdayaan masyarakat kurang baik dan kurang peduli maka kita akan menyikapinya, cara-caranya tentu dengan cara yang persuasif dan humanis. Artinya persuasif dan humanis kita melakukan komunikasi terlebih dahulu jika dengan melakukan komunikasi tidak bisa, kita melakukan dengan memberikan surat dan audiensi. Gerakan yang saat ini sedang bergerak contohnya pada saat gempa bumi bulan november 2022 di cianjur kita membuka posko dengan tagline 'LSM GMBI PEDULI' kita harus menjadi garda terdepan di dalam fenomena sosial yang ada, artinya pun cukup luas ketika kita berbicara tentang LSM GMBI PEDULI bukan berarti kita hanya peduli kepada persoalan yang sifatnya kebencanaan saja. Tetapi juga LSM GMBI terhadap kebudayaan itu kita sikapi, LSM GMBI terhadap anak-anak terlantar itu kita sikapi akan kita bantu untuk bisa bersekolah. Kita akan hadir jika diminta bantuan maupun tidak diminta, kalau diminta biasanya masyarakat datang ke LSM GMBI dan membuat laporan maka kita akan melakukan pergerakan yang sifatnya persuasif dengan aparat pemerintah dan swasta. Dan kita juga melakukan jumat berkah setiap minggunya, darimanakah biayanya itu? Biasanya ada

seseorang yang menitipkan kepada LSM GMBI agar bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan LSM GMBI bukan hanya selalu soal gerakan massa, kami sering mengadakan kegiatan sosial rutin yaitu GMBI Peduli : Bakti sosial santunan anak yatim, jumat berkah, bantuan sosial panti jompo, donor darah, memberikan bantuan kepada korban banjir dan kebakaran, kegiatan sosialisasi program bpjs ketenagakerjaan, berbagi bersama panti orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

M : Apakah bapak bisa menjelaskan struktur kepengurusan LSM GMBI?

N : Struktur kepengurusan LSM GMBI sama dengan organisasi-organisasi lainnya tidak ada yang beda, struktur kepengurusan itu adalah ada dewan penasihat dan ada pembina, tetapi kalau dikota bekasi itu ada dewan pembinanya adalah Bapak Tri Adhianto Tjahyono selaku Plt. Walikota Bekasi dan ada dewan penasehat mereka itu biasanya orang-orang yang peduli terhadap LSM GMBI mereka itu adalah orang yang mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan misalnya penasehat dalam bidang ekonomi, sumber daya manusia dan lainnya. Struktur kepengurusannya yaitu adalah ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa divisi seperti divisi ekonomi, divisi pengamanan, divisi investigasi, divisi non litigasi, dan divisi pemberdayaan perempuan. Dan kita mempunyai badan otonom yang berdiri sendiri dibentuk dari dewan pimpinan pusat yaitu LBH GMBI biro kota Bekasi, jadi kalau dikota atau kabupaten namanya biro LBH tetapi kalau di pusat itu bernama direktur LBH GMBI.

M : Permasalahan apa saja yang ditemui saat melakukan penolakan pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi?

N : Permasalahan yang kita temui ketika melakukan advokasi kepada pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi itu sangat banyak, kita dihadapkan dengan aparaturnya kepolisian dan militer. Pada saat itu mereka beralasan bahwa kereta api adalah alat vital negara yang tidak boleh disentuh atau digerakan. Ketika kita bergerak LSM GMBI tetap menggunakan prinsip persuasif dan humanis dengan melakukan negosiasi tanpa melakukan kekerasan, pengrusakan atau apapun tetapi kita upayakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang mengemukakan pendapat di muka umum, karena itu diatur di undang-undang maka kita lakukan. Walaupun pada saat itu kita dihadapkan dengan aparaturnya negara tetapi ketika rakyat dihadapkan dengan polisi atau tni, kita mengatakan sama sajaini diadu domba tetap kita upayakan terus untuk bernegosiasi dan dari pihak PT. KAI pun menyadari jangan sampai kejadian tersebut menimbulkan korban apalagi sampai *chaos* dan akhirnya kita persuasif dan alhamdulillah bentuk-bentuk persuasif itulah yang kita lakukan. Tantangannya cukup berat contohnya ketua LSM GMBI di intimidasi dan di iming-imingi uang dan janji-janji dari pihak PT. KAI, kami tetap teguh pada prinsip pada saat itu adalah bagaimana para pedagang kaki lima pelaku usaha ekonomi kecil dan menengah masih tetap bisa berdagang di seputaran daerah stasiun kota Bekasi. Aksi yang kita lakukan bersama dengan pedagang kaki lima pada saat itu tidak brutal karena kita

menyampaikan aspirasi masyarakat pedagang kaki lima yang kita dampingi, jika aspirasi kita tidak diterima kita demo lagi, tidak diterima demo lagi, tidak diterima lagi kita harus ke kantor pusat PT. KAI di Bandung. Ketika kita sampai di kantor pusat PT. KAI akhirnya ada solusi yang mereka tawarkan, silahkan berdagang tetapi dengan satu syarat jika nanti stasiun kereta melakukan pembangunan berjalan, pedagang kaki lima harus bergeser dan begitu seterusnya. Alhamdulillah jika para pedagang kaki lima sampai saat ini masih boleh berdagang artinya pemerintah kota Bekasi tidak tutup mata, faktanya juga pemerintah belum bisa memberikan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima. Dan hambatan kita secara internal kita kan mendampingi pedagang kaki lima dan hambatannya jika pedagang kaki lima ada yang tidak sanggup berjuang mereka dengan sendirinya mundur, makanya saya bilang mereka awal mula berdagang dari mulai 100 orang, tinggal 60 orang, lalu tinggal 40 orang, dan dari 40 orang ada yang masih tetap bertahan, karena mereka merasa sangat melelahkan hampir 1 tahun kita bergerak. Karena jika saat ada gerakan aksi maka para pedagang juga harus ikut bersama kami sebagai bentuk keseriusan dari para pedagang kakilima tersebut. Contohnya suaminya yang ikut aksi dan istrinya yang tetap berdagang, karena selama proses upaya-upaya negosiasi yang kita lakukan berlangsung, para pedagang kaki lima harus tetap berdagang. Karena pejuang memang seperti itu harus berjuang menahan penderitaan dan kesengsaraan ya karena memang perjuangan itu kan melelahkan akan tetapi yang bisa merasakan hasilnya

bukan kita LSM GMBI tetapi teman-teman pedagang kaki lima sendiri, berdagang aman dan tidak diusir satpol pp.

M : Bagaimana respon pedagang kaki lima stasiun kota Bekasi saat LSM GMBI membantu kasus pengusuran?

N : Kalau responnya kan pedagang kaki lima sendiri yang meminta bantuan kepada LSM GMBI, pada waktu itu Abah Zakaria memberikan ultimatum atau tantangan kepada LSM GMBI yang pada saat itu masih bernama GMBI Bekasi raya untuk membuktikan kalau GMBI 'sakti' kalau pedagang kaki lima tetap bisa berdagang di stasiun kota Bekasi maka Abah siap menjadi Ketua LSM GMBI.

M : Bagaimana respon masyarakat saat melihat tindakan pengusuran pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi?

N : Ada yang berkomentar baik dan buruk, bagi saya para pedagang kakilima berdagang bukan untuk mencari kekayaan yang lebih tetapi hanya untuk menghidupi kecukupan keluarganya. Yang menolak adanya pedagang kaki lima karena wajar aja katanya digusur karena itukan bukan tempat usaha. Dan lebih banyak yang pro terhadap pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi yang tetap berdagang karena penumpang juga membutuhkan warung terdekat untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan.

Transkrip bapak Are anggota LSM GMBI distrik kota Bekasi

M : Selamat sore pak Are, saya Farizha Alvianda Putra biasa dipanggil Alvin pak. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional, jurusan Ilmu Politik tahun 2016. Saya mohon izin untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Are untuk menyusun skripsi tentang Peran LSM Sebagai Kelompok Penekan Terhadap Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Stasiun Kota Bekasi Tahun 2013 (Studi Kasus LSM GMBI Distrik Kota Bekasi).

N : Selamat sore alvin silahkan, apa yang ingin kamu tanyakan?

M : Sejak kapan bapak bergabung kedalam LSM GMBI?

N : Saya bergabung kedalam LSM GMBI dari tahun 2009

M : Apa keuntungan bapak menjadi anggota LSM GMBI?

N : Keuntungannya yang pertama nyaman, banyak mengenal orang, banyak mengenal pejabat dan relasi. Contohnya tadinya saya yang melihat polisi takut sekarang tidak, tadinya yang tidak mengenal pejabat sekarang bisa kenal, dan saya bisa sadar dari kehidupan yang kelam dan negatif, setelah masuk GMBI saya berhenti mabuk, judi, narkoba dan lainnya.

M : Apa saja program LSM GMBI yang bapak ketahui?

N : Program sosial kita pokoknya membantu apa saja yang terjadi di masyarakat apapun yang kita bisa akan kita bantu.

M : Bagaimana pendapat bapak soal kasus penggusuran pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi?

N : Intinya kalau kita harus membantu para pedagang kaki lima dan tidak setuju jika pedagang kaki lima digusur begitu saja.

M : Apa yang bapak lakukan saat kasus penggusuran pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi?

N : Mendampingi pedagang kaki lima yang ada di stasiun kota Bekasi jangan sampai tergusur untuk bisa mencari nafkah di stasiun, karena cikal-bakal keberadaan LSM GMBI yaitu karena membantu pedagang kaki lima. Sampai kapanpun pedagang kaki lima harus tetap kita pertahankan.

M : Harapan bapak kedepannya terhadap kasus penggusuran pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi?

N : Ya harapannya, tidak ada penggusuran aman-aman saja dan damai yang terpenting masih bisa berdagang.

M : Menurut bapak faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam kasus penggusuran pedagang kaki lima?

N : Hambatannya hanya argumentasi saja, kalo menurut saya PT. KAI sudah punya batasan tertentu pedagang kaki lima tidak boleh

berdagang di dalam stasiun tetapi kan sekarang ini pedagang kaki lima berdagang diluar pagar, berarti seharusnya udah bukan urusan PT. KAI lagi dong dan juga bukan lagi di dalam wilayah PT. KAI makanya jika masih ada pengusuran kita akan terus pertahankan.

M : Menurut bapak cara yang dilakukan LSM GMBI apakah sudah efektif sebagai mediator pihak yang bermasalah?

N : Sangat efektif, karena kita kan mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusi terbaik

M : Bagaimana sebaiknya LSM GMBI menangani kasus pengusuran pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi?

N : Ya harus mencari solusi ke yang mau menggusur, bagaimana cara para pedagang kaki lima kita tidak digusur, jika dipaksakan digusur kita sebagai anggota LSM GMBI harus melawan. Paling utama adalah pedagang kaki lima tetap bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tidak digusur paksa tanpa adanya musyawarah untuk mencapai solusi terbaik, dan para pedagangkaki lima juga harus tetap mengikuti intruksi yang ada dengan menjaga K3 (kebersihan, keamanan dan kenyamanan). Baik itu intruksi dari Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, PT. Kereta Api Indonesia dan LSM GMBI. Supaya apa yang telah kita perjuangkan tidak menjadi hal yang sia-sia hanya karena pedagang kaki lima tidak mematuhi perjanjian yang telah

disepakati bersama, apalagi sampai membuat kericuhan dan melanggar norma-norma yang tertulis maupun tidak tertulis.

M : Apakah menurut bapak pedagang kaki lima perlu diberikan tempat khusus oleh PT. KAI?

N : Ya kalau memang ada tempat nya ya tidak jadi masalah, tetapi kan memang tempatnya yang tidak ada dan sedang kita pikirkan, ya boleh dan sangat baik jika diberikan tempat khusus yang terpenting berdekatan dengan stasiun keluar masuknya penumpang dan dekat dengan jangkauan para penumpang kereta api. Yang terpenting tempatnya layak tetapi yang menjadi masalah jika tempatnya layak untuk berjualan biaya sewanya mahal.

M : Jika perlu, diberikan tempat khusus menurut bapak mengapa harus diberikan tempat khusus?

N : Ya karena pedagang kaki lima ini memang perlu diberikan tempat khusus karena memang tujuannya untuk para penumpang kereta api, dan tempatnya jangan jauh-jauh dan harus dekat dengan stasiun kota Bekasi, agar akses penumpang membeli kebutuhan lebih mudah.

Transkrip Bapak Sanusi, perwakilan ketua pedagang kaki lima stasiun kota Bekasi

M : Sejak kapan bapak berdagang di stasiun kota Bekasi?

N : Awal berdagang itu dari sekitar tahun 2007, pertama kali berdagang kita berdagang di atas peron yaitu di peron 1, 2 dan 3 selama kurang lebih 5 tahun sampai 6 tahun, PT. KAI melakukan revitalisasi stasiun kota Bekasi, dan kami pun dalam hal ini sebagai masyarakat sekitar stasiun yang mencari nafkah di sekitaran stasiun, mendukung dengan seluruh program-program PT. KAI tentang revitalisasi stasiun dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pengguna jasa kereta api, tetapi dengan catatan kami pun sebagai masyarakat sekitaran stasiun kereta api wajib mencari nafkah di area stasiun. Karena didalam undang-undang dasar 1945 setiap warga negara kan mempunyai hak-hak hidup dan berkehidupan, jadi kami tidak meminta banyak dari PT. KAI hanya agar bisa mencari nafkah di stasiun. Dengan adanya penggusuran ditahun 2013 kami ikut aturan main PT. KAI tetap kami mengikuti aturan dan berdagang di luar area stasiun kota Bekasi, dan sampai sekarang alhamdulillah walaupun tidak ada izin resmi tapi kami masih bisa tetap berdagang di stasiun.

M : Masalah apa saja yang dihadapi pedagang kaki lima selama berjualan di area stasiun kota Bekasi?

N : Ya kalau masalah pertama dan kendala yang utama adalah tempat, dalam hal seperti ini kita harus tetap harus terus saling berkomunikasi terutama dengan jajaran pemerintah daerah, ya kami juga ikut mendukung program-program pemerintah contoh program 'Adipura'. Kami siap membantu dan melakukan kebersihan di sekitaran stasiun, kita ingin tempat berdagang yang menjadi mata pencaharian kami dilegalkan, dahulu saat kami berdagang di dalam peron itu sistemnya kontrak lahan dari PT.KAI pusat, karena sudah tidak ada program tersebut ya maka kami berdagang diluar saat ini. Kalau secara langsung PT. KAI mengizinkan kami berdagang tidak mungkin karena tidak ada surat resmi, tetapi alhamdulillah kami masih bisa berdagang di sekitaran stasiun.

M : Apakah ada pembayaran uang sewa selama bapak berjualan?

N : Untuk sewa menyewa itu tidak ada, karena yang berdagang disini pada dasarnya adalah anggota binaan LSM GMBI distrik kota Bekasi, jadi apapun yang kami lakukan dilapangan itu dari anggota untuk anggota.

M : Jika ada pembayaran uang sewa, kepada siapa bapak membayar?N

: Tidak ada uang sewa dan tidak membayar

M : Apakah bapak sanusi mengetahui LSM GMBI distrik Kota Bekasi?

N : Sangat mengetahui, karena saya sendiri termasuk anggota LSM GMBI, semua pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi binaan LSM GMBI dan secara otomatis menjadi anggota LSM GMBI.

M : Darimana bapak mengetahui LSM GMBI?

N : Cikal bakal LSM GMBI lahir adalah, pada dasarnya saat pengusuran pedagang kaki lima yang terjadi di stasiun kota Bekasi, dan kami bergabung kepada GMBI dari tahun 2007, waktu itu dipimpin oleh Abah Zakaria yang masih menjadi ketua pedagang kaki lima stasiun kota Bekasi. Seiring berjalannya waktu Abah Zakaria diangkat menjadi ketua LSM GMBI distrik kota Bekasi dan saya kebetulan ditunjuk oleh Abah Zakaria sebagai kordinator lapangan sampai sekarang ini.

M : Apa pandangan bapak terhadap LSM GMBI?

N : Sesuai dengan visi dan misinya, tujuan utama agar masyarakat bisa berdaya dari segala macam profesi, intinya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat bawah Indonesia.

M : Upaya apa saja yang dilakukan LSM GMBI terhadap kasus pengusuran pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi?

N : LSM GMBI bersama kami selaku pedagang kaki lima bersama-sama melakukan negosiasi dan audiensi ke kantor pusat PT. KAI di Bandung, bukannya kami tidak berusaha kita semua berupaya. Kenapa kami masih bisa bertahan sampai sekarang kalau bukan

melalui perjuangan yang berat. Apalagi pada waktu itu terjadi diskriminasi sosial terkait pembangunan Indomaret, Roti O dan toko lainnya. Kalau memang sudah ada aturan tidak boleh berdagang di dalam stasiun berarti seharusnya semua tidak boleh berdagang dong, bukan hanya pedagang kecil saja yang dilarang. Kami sebagai masyarakat kecil merasa di diskriminasi apalagi kita masyarakat lokal sekitaran stasiun kereta api.

M : Menurut bapak apakah usaha yang dilakukan LSM GMBI sudah efektif?

N : Kalau menurut saya sudah sangat efektif dan sudah sangat membantu, mungkin jika tidak ada LSM GMBI saya sudah tidak berdagang disini, karena LSM GMBI saling bermitra dengan tria politika yang ada di pemerintahan daerah, jadi kuncinya kami tetap selalu berkomunikasi, kalau tidak ada LSM GMBI nasib kami mungkin tidak seperti sekarang dan sudah tergerus.

M : Jika belum efektif, usaha apa yang seharusnya LSM GMBI lakukan?

N : Ya kalau kami sih tidak meminta macam-macam ya hanya saja keinginan kami ya maunya dilegalkan atau resmi berdagang, kita pun tidak keberatan jika ada aturan untuk bayar uang sewa, jadi kami seperti sekarang ini seperti tidak dikasih kepastian. Diberikan

tempat khusus yang strategis agar tidak mengganggu pelayanan PT. KAI.

M : Bagaimana penghasilan yang didapatkan sebelum dan sesudah pengrusakan terjadi?

N : Masalah penghasilan sangat berbeda hasilnya, dulu kita berdagang berhadapan langsung dengan konsumen karna di dalam peron, kalau sekarang karena kita berdagang diluar pagar dan dibatasi jadi penghasilan kami berbeda dengan saat berdagang didalam peron stasiun, akan tetapi kami masih tetap menerima apa adanya dan bersyukur yang terpenting masih tetap bisa berdagang. Jauh lebih besar pendapatan saat berdagang di dalam peron stasiun ketimbang berdagang diluar area stasiun kota Bekasi.

M : Apakah pedagang kaki lima mendapatkan perhatian lebih setelah musyawarah dalam kasus pengrusakan?

N : Tidak ada perhatian khusus, prinsipnya PT. KAI jika dari atasan sudah melakukan keputusan maka ya kami harus mengikuti peraturan tersebut, tetapi kita harus tetap berusaha dan apapun yang terjadi akan kita hadapi karena kami butuh makan untuk menghidupi keluarga.

M : Jika iya, apa saja hal-hal yang harus dilakukan PT. KAI terhadap pedagang kaki lima?

N : Intinya tempat yang layak yang strategis dan permodalan, percuma jika mendapatkan tempat yang bagus tetapi tidak ada pembeli. Alhamdulillah kita semua bisa bangkit lagi perekonomian pedagang kaki lima disini melewati 3 tahun covid-19 dan banyak yang bangkrut dan tidak bertahan akhirnya tidak berdagang. Harusnya disediakan tempat atau kantin di dalam stasiun dan juga koperasi.

M : Apa dampak yang dirasakan selama LSM GMBI membantu proses kasus pengusuran?

N : Sangat banyak dampak yang dirasakan, yang pertama sampai sekarang saya masih berdagang, kalau tidak ada bantuan dari LSM GMBI dari awal pengusuran mungkin saya tidak berdagang sampai sekarang, dan juga sampai saat ini kami sudah hampir tidak pernah ada pengusuran dan razia dari satpol PP secara tidak langsung kami berdagang aman dan nyaman, paling jika area ingin di sterilkan maka kita harus mengikuti aturan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan dan yang telah disepakati bersama.

M : Bagaimana harapan bapak sebagai pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi kedepannya?

N : Harapan saya pertama yaitu ketenangan dalam berdagang, kedua tempat yang layak dan resmi, ketiga permodalan dan pemberdayaan masyarakat.

Lampiran 3

Dokumentasi anggota LSM GMBI saat melakukan lomba 17 Agustus 2022 di Sekertariat LSM GMBI Distrik Kota Bekasi



Gambar 1. Dokumentasi foto bersama Bapak Delvin Chan Wakil Ketua LSM GMBI Distrik Kota Bekasi



Gambar 2. Dokumentasi foto bersama Bapak Asep Sukarya Sekertaris Jenderal LSM GMBI Distrik Kota Bekasi







Gambar 3. Dokumentasi foto bersama Bapak Dedi Alamsyah Wakil Sekertaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi



Gambar 4. Dokumentasi foto bersama Bapak Sanusi ketua pedagang kaki lima stasiun kota Bekasi



SKRIPSI ALVIN 2

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	3%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	text-id.123dok.com Internet Source	1%
5	www.kompas.com Internet Source	1%
6	digilib.unimed.ac.id Internet Source	1%
7	iqbalunimed.files.wordpress.com Internet Source	1%
8	liputantimur.com Internet Source	1%
9	gmbipusat.wordpress.com Internet Source	<1%

10	repository.mercubuana.ac.id Internet Source	<1%
11	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
12	repository.unas.ac.id Internet Source	<1%
13	emakalahonline.blogspot.com Internet Source	<1%
14	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
15	risqafujilestari19.blogspot.com Internet Source	<1%
16	kekegpw.blogspot.com Internet Source	<1%
17	staff.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1%
18	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
19	anaktarbiyahmpi.blogspot.com Internet Source	<1%
20	123dok.com Internet Source	<1%
21	issuu.com Internet Source	<1%

22	cerdasco.com Internet Source	<1 %
23	Ressa Fitriana, Afifa Ulfa Auliya, Agus Widiyarta. "ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN DELIBERATIF", JURNAL GOVERNANSI, 2020 Publication	<1 %
24	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
26	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
27	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
28	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
29	eprints2.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.wima.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
	thesis.umy.ac.id	

32

Internet Source

<1%

33

es.scribd.com

Internet Source

<1%

34

www.repository.ugm.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 20 words

